



LAPORAN

VISITASI KEPEMIMPINAN NASIONAL

TEMA :

Kepemimpinan Adaptif dalam Penguatan Tata Kelola Ketahanan Pangan untuk Mewujudkan Kemandirian, Resiliensi, dan Daya Saing Pangan Daerah

SUB TEMA :

Penguatan Kepemimpinan Adaptif dalam Tata Kelola Rantai Pangan untuk Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Masyarakat

Lokus :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi



SIPADU TANIA

(EKOSISTEM TERPADU TATA NIAGA PANGAN)

Disusun Oleh:

KELOMPOK 2A

Widyaiswara Pembimbing:

MOCHAMAD SULUH, SH., M.Si.



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026



BPSDM
JAWA TIMUR

SELAMAT DATANG PESERTA
VISITASI KEPEMIMPINAN NASIONAL (VKN),
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
(PKN) TK. II ANGKATAN XI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020
DI KEBUNYARAN

DAFTAR NAMA KELOMPOK 2A

No	NDH	Nama
1	1	Muh. Zainul qomar, S. Ag., M.Si.
2	2	Jemmi Tria Sukmana, SE, MM
3	6	Drs. Muhammad Nur Fuad Fauzi, M.T.
4	7	Silvester Teda Sada, S.Fil
5	9	drg. Emerentiana Reni Wahjuningsih, M.Hlth&IntDev
6	11	Drs. Nor Alam, M.Si
7	13	Abdul Kadir Jaelani, S.Sos., M.Si.
8	16	Liza Neirasari, S.T., M.T.
9	18	Siti Rochana, ST., M.Si
10	20	Herman Marthen Rumbewas, S.Sos., M.MP
11	22	Agung Supriyadi, SE
12	24	Yudi Suprpto, S.H., M.H.
13	25	Hengky Cornelis Malelak, S.STP, M.Si

"Bersinergi, Berinovasi, Berprestasi"
Untuk Kepemimpinan yang Adaptif dan Berdaya Saing





LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

VISITASI KEPEMIMPINAN NASIONAL

TEMA :

Kepemimpinan Adaptif dalam Penguatan Tata Kelola
Ketahanan Pangan untuk
Mewujudkan Kemandirian, Resiliensi, dan Daya Saing Pangan Daerah

SUB TEMA :

Penguatan Kepemimpinan Adaptif dalam Tata Kelola
Rantai Pangan untuk Menjaga Stabilitas Pasokan
dan Harga Pangan Masyarakat

LOKUS :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

SIPADU TANIA

(EKOSISTEM TERPADU TATA NIAGA PANGAN)

Mengetahui,

Widyaiswara Pembimbing

Ketua Kelompok 2A

MOCHAMAD SULUH, SH., M.Si.

Drs. MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI, M.T.



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyuasin adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan UU No.6 Tahun 2002. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II membekali peserta dengan kompetensi kepemimpinan strategis dalam menghadapi dinamika lingkungan organisasi. Kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Tahun 2026 dengan Tema Angkatan Kepemimpinan Adaptif dalam Penguatan Tata Kelola Ketahanan Pangan untuk Mewujudkan Kemandirian, Resiliensi, dan Daya Saing Pangan Daerah sedangkan fokus pada penguatan tata kelola rantai pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin dipilih sebagai lokus karena perannya yang sangat strategis sebagai lumbung pangan dan daerah produsen utama di Provinsi Sumatera Selatan karena nomor 2 Lumbung Pangan Nasional dengan produksi padi terbesar di Indonesia sebanyak 1.163.416 ton/GKG sebagai Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuasin memiliki Luas Baku Sawah (LBS) 189.345 ha terdiri dari Luas Sawah Pasang Surut 164.410 ha, Luas Sawah Lebak 23.737 ha, Luas Tambah Tanam 232.979 ha dan Luas Panen 228.183 ha dengan Produksi Padi (GKG) sebanyak 1.163.416 ton dan Produksi Beras sebesar 647.974 ton. Asta Cita ke-2 dan ke-3 yaitu swasembada pangan serta kemandirian ekonomi kerakyatan Ekosistem terpadu tata niaga pangan oleh dinas yang mengampu fungsi koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, dan perdagangan Kabupaten Banyuasin merupakan wujud nyata dukungan daerah dinamika lingkungan yang semakin kompleks melalui penguatan tata kelola, peningkatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi dan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Kepemimpinan adaptif tidak hanya dituntut mampu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perubahan, tetapi juga mampu membangun ekosistem kerja yang terintegrasi guna memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.



1.2

Profil Singkat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Banyuasin



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 7 Tahun 2025. Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, serta Pengelolaan Pasar. Struktur organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, didukung oleh Sekretariat, Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pengelolaan Pasar, serta unit pelaksana teknis.

Berdasarkan data kepegawaian, Diskoperindag didukung oleh total 163 pegawai, yang terdiri atas 36 PNS, 17 CPNS, dan 110 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan target Rencana Strategis (Renstra) 2025–2030, dinas ini mengemban target kinerja utama untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (dari 28,31% menjadi 31,25%), kontribusi sektor perdagangan (dari 16,47% menjadi 18,19%), serta kontribusi UMKM terhadap PDRB (dari 19,50% menjadi 34,50%) pada tahun 2030.



II. KEUNGGULAN KOMPETITIF



Berdasarkan hasil observasi lapangan dan analisis komprehensif, Diskoperindag Kabupaten Banyuasin memiliki sejumlah keunggulan kompetitif (*competitive advantages*):



- **Potensi Sumber Daya Alam & Geografis yang Melimpah:** Kabupaten Banyuasin memiliki potensi bahan baku industri pertanian, perkebunan, dan perikanan yang sangat besar, sehingga menarik minat investor dan menciptakan efek domino (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan sektor perdagangan.



- **Resiliensi Sektor Perdagangan & UMKM:** Berkembangnya transaksi





- digital (e-commerce) pascapandemi memperkuat sektor perdagangan, didukung oleh meningkatnya kesadaran kewirausahaan masyarakat serta kemudahan perizinan berusaha.



• **Komitmen Kepemimpinan dan Arah Renstra yang Jelas:**

Terdapat arah kebijakan yang terstruktur melalui Renstra 2025–2030 yang secara progresif menargetkan peningkatan kontribusi UMKM, industri, dan perdagangan terhadap perekonomian daerah.



• **Jejaring Kemitraan Lintas Sektor:**

Dinas telah membangun kolaborasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan asosiasi dalam pembinaan pelaku usaha.



III. PERMASALAHAN & TANTANGAN STRATEGIS

Melalui analisis menggunakan metode AKPL, SWOT, Fishbone, dan 5 Why's Analysis, teridentifikasi isu strategis utama di lokus:



Isu Prioritas Utama :

Belum optimalnya kesejahteraan dan perlindungan ekonomi, petani, nelayan di tingkat tapak akibat struktur rantai pasok yang Panjang, kerentanan permodalan, serta belum berpihak margin nilai tambah di tengahtingginya volume produksi daerah..



Akar Penyebab Utama (5 Why's):

Belum terbentuk ekosistem tata kelola tata niaga pangan yang mengintegrasikan data, proses bisnis, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan secara adaptif.



3.1 Rincian Permasalahan



a. **Pengelolaan Data yang Masih Sektoral:**

Data mengenai koperasi, UMKM, industri, distribusi, dan perkembangan harga masih dikelola secara parsial di masing-masing bidang, sehingga konsolidasi informasi untuk perencanaan dan pengawasan harga belum optimal.



b. **Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Terpadu:**

Koordinasi antarbidang dan dengan pemangku kepentingan eksternal masih berjalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi dalam satu sistem tata niaga pangan bersama.



c. **Kapasitas Pelaku Usaha yang Beragam:**

Tantangan dalam kualitas produk, legalitas, akses pembiayaan, dan literasi digital pelaku usaha pangan di tengah target peningkatan rasio kewirausahaan yang ambisius.



pangan di tengah target peningkatan rasio kewirausahaan yang ambisius.



- d. **Tantangan Geografis & Infrastruktur:**
Bentang alam daerah yang luas memerlukan biaya logistik tinggi, serta konektivitas jaringan internet yang belum merata di setiap wilayah klaster.



IV. RUMUSAN SOLUSI & INOVASI: SIPADU TANIA

Sebagai solusi strategis, dirumuskan inovasi **SIPADU TANIA** (Ekosistem Terpadu Tata Niaga Pangan), yaitu model tata kelola yang mengintegrasikan data, informasi, proses bisnis, layanan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan tata niaga pangan secara terpadu, adaptif, dan berkelanjutan.



4.1 Rencana Aksi Implementasi

Fase Waktu	Fokus Rencana Aksi	Output Utama
 Jangka Pendek (Minggu 1 – 8)	Penyusunan regulasi, pembentukan Tim Ekosistem Tata Niaga Pangan lintas bidang, pemetaan rantai pasok, serta pelaksanaan FGD bersama stakeholder.	 SK Tim, Roadmap, SOP, dan Desain Proses Bisnis.
 Jangka Menengah (Bulan 3 – 12)	Integrasi data pelaku usaha dan komoditas pangan, pengembangan dashboard monitoring harga & distribusi, serta peningkatan kapasitas SDM dan kemitraan strategis.	 Dashboard Eksekutif SIPADU TANIA & Integrasi Data.
 Jangka Panjang (Tahun 2 – 3)	Melembagakan SIPADU TANIA ke dalam kebijakan pembangunan daerah, pengembangan interoperabilitas sistem, dan replikasi model tata kelola.	 Sistem Berkelanjutan & Interoperabilitas Sistem.

4.2. Strategi Digitalisasi & Arsitektur Teknologi

SIPADU TANIA memanfaatkan infrastruktur teknologi yang ada secara efisien (Basis Data Terpadu, Dashboard Eksekutif, Portal Informasi, Cloud Storage, API & Integrasi Sistem).



(PLATFORM SIPADU TANIA)
Terpadu • Adaptif • Kolaboratif • Berkelanjutan



Form Digital, serta integrasi dengan OSS) untuk memastikan ketersediaan data pasokan dan harga pangan secara *real-time* bagi pengambil keputusan.



V. REKOMENDASI & LESSON LEARNT

5.1

Rekomendasi untuk Diskoperindag Banyuasin



Kepada Bupati Banyuasin:

Memberikan dukungan kebijakan strategis dan penguatan regulasi agar SIPADU TANIA menjadi kebijakan mandatori dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah.



Kepada Sekretaris Daerah & Bappeda:

Mengoordinasikan sinkronisasi lintas perangkat daerah serta mengintegrasikan anggaran pengembangan SIPADU TANIA ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.



Kepada Kepala Diskoperindag:

Menetapkan Keputusan Kepala Dinas terkait Tim Pengelola Ekosistem, memberlakukan SOP terintegrasi, dan mengoptimalkan kolaborasi lintas bidang.



Kepada OPD Terkait & Mitra

(Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Bulog, BPS, Perbankan): Memperkuat pertukaran data produksi, distribusi, dan pembiayaan untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan.



5.2

Lesson Learn (Pembelajaran Empiris) bagi Peserta PKN

1.



Kepemimpinan adaptif menjadi faktor utama dalam membangun tata niaga kelola ketahanan pangan pemimpin strategis mampu merespons perubahan, memperkuat kolaborasi, dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan.

2.



Integrasi data dan pemanfaatan **teknologi digital** meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berdasarkan data melalui penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi antar pemangku kepentingan.

3.



Kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah, Koperasi, UMKM, dunia usaha, dan mitra strategis terbukti memperkuat rantai pasok pangan serta mendukung ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.

4.



SIPADU TANIA merupakan inovasi tata kelola yang mengintegrasikan data, proses bisnis, dan kolaborasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tata niaga pangan.

5.



Potensi Kabupaten Banyuasin sebagai lumbung pangan nasional akan semakin optimal apabila didukung oleh kepemimpinan yang adaptif, transformasi digital, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan yang berkelanjutan.





Dokumentasi Kegiatan VKN Tk. II Angkatan XI Tahun 2026 Tgl 27/28-7-2026

